



## ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana ketidaksetaraan kekuasaan yang terjadi dalam hubungan aktor yang memiliki kuasa dan yang tidak memiliki kuasa, berkontribusi dalam membentuk *ecological debt*. Menggunakan studi kasus eksploitasi minyak di Niger Delta, ketidaksetaraan kekuasaan terjadi pada dua masa: masa kolonial dan masa paska-kolonial. Pada masa colonial Nigeria, ketidaksetaraan kekuasaan terjadi dalam ekspansi colonial yang dilakukan oleh Inggris, dengan cara memberikan lisensi minyak eksklusif hanya kepada perusahaan yang datang dari Inggris – Shell d’Arcy, yang karena kedatangan perusahaan tersebut, masyarakat sekitar secara dipaksa harus meninggalkan tanah dan sumber daya alam yang mereka miliki, karena itu semua dipakai sebagai alat dan wilayah untuk pengambilan minyak. Status mereka diubah menjadi bukan pemilik dari yang sebelumnya pemilik sumber daya alam, dan mereka tambah dirugikan karena Inggris dan Shell bekerja sama mengambil keuntungan dari minyak untuk mensejahterakan diri mereka sendiri. Setelah era colonial berakhir, ketidaksetaraan kekuasaan berlanjut dalam masa paska-kolonial oleh korupsi-korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, mencuri uang keuntungan minyak untuk memperkuat posisi mereka dan hubungan *patron-client* yang ada. Sama dengan masa colonial, masyarakat sekali lagi dirugikan dengan tindakan ini, dan segala gerakan bertujuan untuk mengganti system yang tidak adil tersebut selalu ditanggapi dengan kasar. Ketidakmampuan masyarakat Niger Delta untuk mendapatkan akses terhadap sumber dayanya, yaitu tanah dan keuntungan dari ekstraksi minyak, membentuk apa yang disebut dengan *ecological debt* – suatu tuntutan untuk mendapat keadilan. Debt ini datang dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang minim, infrastruktur yang tidak ada, masalah-masalah kesehatan yang mengkhawatirkan, dan tingginya angka pengangguran semenjak industry minyak ada. Teori akumulasi primitif yang dikembangkan oleh Karl Marx akan dipakai untuk menjelaskan bagaimana masyarakat setempat dipisahkan secara paksa dari harta bendanya, dan teori *ecologically unequal exchange* akan digunakan untuk memberikan penjelasan yang lebih detil tentang bagaimana ketidaksetaraan kekuasaan tetap terjadi, walaupun kuasa colonial sudah tidak ada. Karena *ecological debt* adalah konsep yang menjunjung tinggi permintaan terhadap keadilan, skripsi ini maka dari itu akan berargumen bahwa semakin terpinggirkannya masyarakat, semakin besar pula *ecological debt* yang ada, dan ini dapat dilihat dari gerakan social yang ada, dan apakah pemerintah memberikan respon yang baik terhadap permintaan yang mereka berikan.

**Kata Kunci:** Ketidaksetaraan Kekuasaan, *Ecological Debt*, Akumulasi Primitif, Nigeria, dan Minyak.



## ABSTRACT

This undergraduate thesis aims to explain how unequal power relations partaking between the superior and inferior actors are contributing to the making of ecological debt. Using the case study of oil exploitation in the Niger Delta, unequal power relations are divided into two specific time frame: the colonial era of Nigeria and the post-colonial era of Nigeria. During the colonial era of Nigeria, unequal power relations took place in the form of British colonial expansion, granting exclusive oil licenses solely to British company – Shell d’Arcy, forcefully expulsing the locals off their lands, as their lands are utilized for oil-extraction area. They were turned from the previously owner into non-owner of resources, severely marginalized as both British and Shell cooperated together to accumulate oil profit to prosper their own interests. After the colonial expansion perished, unequal power persisted through post-colonial government corrupted behavior, stealing the oil wealth to strengthen their political positions and patron-clients relations. Similarly, the locals’ rights were denied and movements aimed to alter this unjust system were responded coercively. This inability for Niger Delta’s locals to claim over their own resources in terms of lands and oil wealth, constructed the ecological debt – demand for justice. These debts came in a form of poor development, non-existent infrastructure, severe health issues, and high number of unemployment found after the oil industry commenced. Karl Marx’s theory of primitive accumulation is utilized to explain how the locals were separated from their properties through inhumane actions, and ecologically unequal exchange theory is used to further elaborate how unequal power persisted in spite of the departure of colonial power. As ecological debt deals with demand for justice, the thesis will therefore argue that the more marginalized the locals are, the greater the ecological debt is, and this could be seen from the number of social movements and whether or not the government responded well towards their demands.

Keywords: Unequal Power, Ecological Debt, Primitive Accumulation, Nigeria, and Oil.